



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah diamanatkan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan dalam RKPD untuk didanai oleh masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan sebagai penjabaran RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kerangka makro rencana pembangunan jangka menengah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang penjabarannya berpedoman pada rencana strategis yang efektif dan efisien yang mampu menghasilkan dampak pembangunan ekonomi, sosial budaya dan dampak lingkungan lainnya.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat sehingga tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini, diucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD | 10 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 11 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 15 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 16 |
| BAB III. TUJUAN, SASARAN | 17 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 17 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD..... | 18 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 19 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 23 |
| 4.1.Rencana Kerja dan Pendanaan | 23 |
| BAB V. PENUTUP | 25 |

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah memasuki tahap tahun ketiga dalam pelaksanaannya. Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagai tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis, menjadi salah satu penentu keberhasilan Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan-kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dan direalisasikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Guna melanjutkan pelayanan Perangkat Daerah menuju pencapaian Rencana Strategis periode 2019-2023 dilakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta situasi dan kondisi saat ini yaitu pandemi covid 19 serta wacana Ibu Kota Negara (IKN) . Perubahan berbagai kebijakan secara otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian baik itu pada sasaran pembangunan, arah kebijakan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode tahun ke 4 (empat), yang mana merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada RKPD, yang akan memberikan gambaran tentang program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran, dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai Tupoksinya. Dengan muatan renja seperti program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
21. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/6295 /B.PPEPD-Bapp/2022 tanggal 11 Juli 2022 Hal Pengisian Data Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

- a. Menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kaltim;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD BPBD Provinsi Kaltim;
- d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2019-2023 yang dimanifestasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;

- f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Memberikan dasar bagi PD dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (Performance Accountability Report);
- i. Mengoptimalkan kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kaltim berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja.

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan
Pencapaian Renja s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

| Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (output)/sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Prog (Renstra) s/d Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2021 (n-1) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2021 (n-1) | | Keterangan |
|----------|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d September 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/9)*100 | 12 |
| 05 03 07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlayaniinya Administrasi Perkantoran | Persen | | 100 | 100 | 93 | 93 | | | |
| 05 03 07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM) | Persen | 95 | 100 | 85 | 93 | 109 | | | Penyesuaian Indikator Kinerja Prog |
| 01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran | Bulan | 24 | 12 | 12 | | 0 | | | |
| 05 03 08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | | | 100 | | | | | |
| 05 03 08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur | unit | 4 | 4 | 100 | 98 | 98 | | | Penyesuaian Indikator Kinerja Prog |
| 02 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana | Bulan | 24 | 12 | 12 | | 0 | | | |
| 03 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Barang Peningkatan Sarpras Peralatan Kantor | unit | 75 | | 50 | | | | | |
| 05 03 09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persen | | | 85 | 97 | 114 | | | |
| 05 03 09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Percentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi | Persen | 70 | 17 | 85 | 97 | 114 | | | Penyesuaian Indikator Kinerja Prog |
| 01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kegiatan | 70 | 24 | 16 | | 100 | | | |
| | | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kegiatan | 207 | 71 | 48 | | | | | |
| | | Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman | Bulan | 48 | 12 | 12 | | | | | |
| | | Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek | Orang | 8 | 8 | | | | | | |
| 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek | orang | 132 | | 40 | | 85 | | | |
| | | Jumlah Seragam PNS | orang | 53 | | 53 | | | | | |
| | | Jumlah Seragam Tenaga Teknis/ Non Teknis | orang | 39 | | 12 | | | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana | Orang | | | | | | | | |
| 05 03 10 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan | Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah | Persen | 80 | 75 | 75 | | | | | |
| 05 03 10 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai | 276 | 66 | 68 | | | | | Penyesuaian Indikator Kinerja Prog |
| 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Dokumen | 40 | 10 | 10 | | 0 | | | |
| 02 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Dokumen | 20 | 5 | 5 | | 0 | | | |

PERMENDAGRI 90 / 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 | 11=(10/9)*100 | 12 |
|----------|---|---|------------------|------|-----|-----|-------|-----|----|------------------------------|--|
| | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Kab/Kota | 40 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana | Orang | 490 | 120 | 130 | 0 | | | | |
| | | Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian | Kab/Kota | 40 | 9 | 10 | 0 | | | | |
| 05 03 49 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persen | 85 | 85 | 85 | 80 | 94 | | | |
| 12 | Kedaurahan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyelenggaraan Kedaurahan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Persen | | 85 | | | | | | |
| 13 | Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana | Jumlah koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanganan Bencana | Kali | 51 | | 17 | 18 | 106 | | | |
| | | Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana | Laporan | 6 | | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | Jumlah koordinasi dalam penanganan darurat bencana | Kali | 60 | | 20 | 10 | 50 | | | |
| 14 | Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan | Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia | barang | 300 | | 100 | | | | | |
| | | Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia | unit | 300 | | 75 | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana | orang | 285 | | 70 | | | | | |
| | | Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana | orang | 360 | | 120 | | | | | |
| 15 | Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana | Jumlah peserta Pelatihan SAR | Orang | 90 | | 30 | | | | | |
| | | Jumlah peserta Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC) | Orang | 90 | | 30 | | | | | |
| 16 | Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) | Jumlah peserta Peringatan Bulan PRB | orang | 30 | | 10 | | | | | |
| | | Jumlah pendataan, kai cepat PB, dan penyebaran informasi kebencanaan | Kab/Kota | 30 | | 10 | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pemantauan Titik Panas | Laporan | 36 | | 12 | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pemantauan Early Warning System | Laporan | 36 | | 12 | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan | Laporan | 36 | | 12 | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan PUSDALPOS-PB | Laporan | 36 | | 12 | | | | | |
| 05 03 51 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana | Desa / Kelurahan | 23 | | 8 | 1 | 13 | | | |
| 03 | Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat | Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana | Orang | 240 | 60 | 60 | | | | | |
| | | Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana | Orang | 960 | 240 | 240 | | | | | |
| | | Jumlah peserta penyiaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana | Orang | 120 | 30 | 30 | | | | | |
| | | Jumlah peserta fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tercapui Beberapa | Orang | 720 | 180 | 180 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Rajaan dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana | Dokumen | 24 | 6 | 6 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan RAK Desa Tangguh Bencana | Dokumen | 24 | 6 | 6 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Pemetaan Sistem Peringatan Dini Desa Tangguh Bencana | Dokumen | 24 | 6 | 6 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Rencana Kontinjenji Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana | Dokumen | 32 | 8 | 8 | | | | | |
| | | Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana | Orang | 960 | 240 | 240 | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana | Orang | 840 | 210 | 210 | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana | Orang | 480 | 120 | 120 | | | | | |
| | | Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana | Peta | 24 | 6 | 6 | | | | | |
| | | Jumlah Rambu-rambu Destana | Buah | 360 | 90 | 90 | | | | | |
| | | Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana | Laporan | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| | | Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional | Orang | 60 | 15 | 15 | | | | | |
| 04 | Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana | Jumlah Peta Rawan Bencana | Peta | 5 | | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana | Dokumen | 2 | | 1 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) review | Dokumen | 1 | | 1 | | | | | |
| 05 | Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana | Kegiatan | 25 | 1 | 1 | | | | | |
| 16 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kehancuran | Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana | Dokumen | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| | | Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS) | Unit | 11 | 2 | 3 | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan peralatan Peringatan Dini (EWS) | Unit | 43 | 7 | 9 | | | | | |
| | | Jumlah lokasi monitoring daerah Rawan Bencana | Kab/Kota | 40 | 10 | 10 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review | Dokumen | 3 | 1 | 1 | | | | | |
| | | Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan | Media | 12 | 3 | 3 | | | | | |
| | | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan | Aplikasi | 1 | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana | Orang | 5 | 5 | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional | Orang | 100 | 100 | | | | | | |
| 17 | Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan | Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | Orang | 300 | | 100 | | | | | |
| | | Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana | Orang | 1500 | | 500 | | | | | |
| | | Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional | Orang | 750 | | 250 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Rencana Kontinjenji Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana | Dokumen | 3 | | 1 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen review Rencana Kontinjenji Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana | Dokumen | 3 | | 1 | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga | Orang | 1500 | | 500 | | | | | |
| | | Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana | Kab/Kota | 3 | | 1 | | | | | |
| | | Jumlah Kab/Kota yang mendapat pelayanan informasi rawan berbencana | Kab/Kota | 30 | | 10 | | | | | |
| | | Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) | Orang | 78 | | 26 | | | | | |
| | | Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan | Dokumen | 1 | | - | | | | | |
| 05 03 51 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh/ siaga Bencana dan Terakses Informasi Peringatan Dini pada Daerah Rawan Bencana | Persen | | | | | | | dilaksanakan pada tahun 2018 | Program Pada Periode Restra 2014-2018 |
| 16 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kehancuran | Jumlah Monitoring Daerah Rawan Bencana | Kab/ Kota | | | | | | | | Kegiatan Pada Periode Restra 2014-2018 |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana | orang | | | | | | | | |

PERMENDAGRI 90/2019

PERMENDAGRI 90/2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/9)*100 | 12 |
|--------------------|--|---|----------------------|------|----|------|---------|-----|-------|------------------------------|---|
| 05.03.59 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | desa/ Kelurahan | | | | | | | dilaksanakan pada tahun 2018 | Program Pada Periode Restra 2014-2018 |
| 03 | Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat | Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana | orang | | | | | | | | Kegiatan Pada Periode Restra 2014-2018 (Kemudian Berlalu Pada Program Pencegahan dan) |
| | | Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur | Desa Tangguh Bencana | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana | Orang | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh | Orang | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana | Dokumen | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan RAK Desa Tangguh Bencana | Dokumen | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pemetaan Sistem Peringatan Dini Desa Tangguh Bencana | Dokumen | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peta Jalur Evakuasi Peringatan Dini | Peta | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Perkembangan Desa Tangguh Bencana | Laporan | | | | | | | | |
| 05.03.55 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Persen | 80 | 20 | 40 | 35 | 88 | | | |
| 01 | Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Jumlah Peserta Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Orang | 140 | 30 | 30 | | 0 | | | |
| | | Jumlah Peserta Kegiatan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Orang | 140 | 30 | 30 | | 0 | | | |
| | | Jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | laporan | 4 | 1 | 1 | | 0 | | | |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | laporan | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | | | |
| 02 | Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana | Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Orang | 90 | | 30 | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Orang | 105 | | 35 | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi | Orang | 90 | | 30 | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Dokumen | 3 | | 1 | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Dokumen | 3 | | 1 | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Dokumen | 3 | | 1 | | | | | |
| 05 | Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) | Kab/Kota | 40 | 10 | 10 | | | | | |
| | | Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Kab/Kota | 30 | | 10 | | | | | |
| | | Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Gerg Kepada Masyarakat Pascabencana | Lembar | 4500 | | 1500 | | | | | |
| 06 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Kab/Kota | 30 | | 10 | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota | Kab/Kota | 30 | | 10 | | | | | |
| 05.03.55 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persen | | 5 | | | | | | Indikator Kinerja Masih Menggunakan Renstra 2014-2018 |
| 05 | Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Laporan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) | Laporan | | 10 | | | | | | |
| | | Laporan Monitoring Fisik Pemecah Ombak | Laporan | | 10 | | | | | | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Percentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana | % | 95 | | | | 95 | 45,36 | 47,74 | |
| 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Percentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Persen | 100 | | | | 100 | 75,56 | 75,56 | |
| 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 10 | | | | 10 | 6 | 60 | |
| 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | laporan | 9 | | | | 5 | 5 | 100 | |
| 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Laporan | 3 | | | | 3 | 2 | 67 | |
| 1.05.01.1.02.01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Percentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | | | | 100 | 75 | 75 | |
| 1.05.01.1.02.01.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan | dokumen | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tujuan ASN | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tujuan ASN | dokumen | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.01.1.02.03 | Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tujuan ASN | Jumlah Dokumen Adminitrasi Pelaksanaan tujuan ASN | dokumen | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.01.1.03 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Percentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 0 | | | | 100 | 0 | 0 | |
| 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaihan yang Didakan | stel | 0 | | | | 75 | 0 | 0 | Bergantung |
| 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Percentase Cukupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | | | | 100 | 46,59 | 46,59 | |
| 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor | unit | 41 | | | | 11 | 2,00 | 18,18 | |
| 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | laporan | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.01.1.06.05 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi | OT | 80 | | | | 145 | | | |

PERMENDAGRI 90 / 2019

PERMENDAGRI 90 / 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 | 11=(10/9)*100 | 12 |
|-----------------|---|--|------------------|-------|---|---|-------|-------|-------|---------------|--------------------------------------|
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | | | | 100 | 75 | 75 | |
| 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS Kantor | Laporan | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | | | | | | | | | | |
| 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | | | | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional | unit | 10 | | | | 58 | 0 | 0 | |
| 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelenkapkan kantor | unit | 50 | | | | 64 | 0 | 0 | |
| 1.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana | m ² | 3398 | | | | 3398 | | 0 | |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | % | 82,67 | | | | 66,67 | 35,50 | 53,25 | |
| 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan | Persen | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | |
| 1.05.03.1.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi | dokumen | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | |
| 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persen | 100 | | | | 100 | 67 | 67 | |
| 1.05.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana | dokumen | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | |
| 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan | Laporan | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.03.1.02.06 | Pengurutan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk | Desa / Kelurahan | 12 | | | | 4 | 4 | 100 | |
| 1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pasca bencana Provinsi | Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana | Laporan | 5 | | | | 5 | 3 | 60 | |
| 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana | Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) | orang | 30 | | | | 30 | 30 | 100 | |
| 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | | | | 100 | 75 | 75 | |
| 1.05.03.1.03.02 | Respon cepat penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana | Laporan | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.03.1.03.04 | Penyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia | Laporan | 12 | | | | 12 | 9 | 75 | |
| 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | |
| 1.05.03.1.04.04 | Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan | Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan | Aplikasi | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | Proses Pengajuan Perubahan Indikator |

Pelaksanaan Rencana kerja 2021 berada di triwulan ke II, terdapat penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa sub kegiatan sebagai akibat dari masih berlangsungnya wabah covid 19, capaian realisasi kinerja pembangunan tahun 2021 belum mencapai terhadap target yang ditentukan, dan perkembangan kasus wabah covid 19 yang mengalami kenaikan maka diperlukan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penanganan wabah virus corona (COVID 19) di provinsi Kalimantan Timur.

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja program/kegiatan :
 - Masih terdapat ketidaksesuaian rencana kerja dan penganggaran, rencana kerja yang didesain atau disusun tidak diikuti dengan pembiayaan yang optimal
 - Pemberlakuan kebijakan pembatasan upaya penekanan peningkatan kasus covid 19, berdampak pada proses pelaksanaan pencapaian kegiatan

- b. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya penyesuaian terkait pembatasan selama covid 19 terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah tentunya berpengaruh terhadap capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur khusus percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu penyesuaian pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Review) secara berkala.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait investasi suatu wilayah atau kawasan yaitu memberikan keadaaan kondusif terkait manajemen penanggulangan bencana pada wilayah atau kawasan pembangunan.
2. Pelayanan penecegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemanfaatan program kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.

4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD
Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|--|--|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) | Tahun 2023 (n+1) | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | 2022 (n) | 2023 (n+1) | | |
| I | Indikator Sasaran | | | | | | | | | | | | |
| | Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana | | | 61,33% | 66,67% | 82,67% | 100% | 61,33% | 62,67% | 82,67% | 100% | | Penguatan Kapasitas kawasan yaitu dengan pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di tahun 2021 dilaksanakan di 2 kab/Kota yaitu Kota Samarinda dibentuk Destana Kelurahan Bandara, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu destana Sungai Meriam dan Desa Anggana. |
| 1 | Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan | YA | | - | 100% | 100% | 100% | - | 10% | 100% | 100% | | Penyusunan Rencana Kontenjenji (Renkon) Kab/ Kota, yaitu pendampingan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 penyusunan Renkon Longsor Kota Balikpapan. |
| 2 | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | YA | | - | 100% | 100% | 100% | - | 25% | 100% | 100% | | (1). Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dianggarkan pada tahun 2021, kemudian dilakukan revisi rincian belanja, memperhatikan terhadap kecukupan waktu dan berdasarkan informasi bahwa BNPB dalam proses penyusunan KRB Prov. Kaltim, dimana dokumen tersebut akan diserahkan pada bulan Desember 2021 maka oleh BPBD Prov. Kaltim penyusunan dokumen KRB Prov. Kaltim tidak dilanjutkan. (2). Pengumpulan dan penyampaian data dan informasi kebencanaan Kab/Kota. (3) Kaji Kebutuhan saat tanggap darurat bencana |
| 3 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | YA | | - | 100% | 100% | 100% | - | | 100% | 100% | | |
| 4 | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | YA | | - | 100% | 100% | 100% | - | 10% | 100% | 100% | | |

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat Pelayanan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Prov. Kaltim

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang pencapaianya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

- 1) Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana
- 2) Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana

Berdasarkan pada RPJMD P 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur, serta berdasarkan pada penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan maka sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan penyesuaian 1 (satu) sasaran strategis dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase desa/kelurahan tangguh bencana.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana,** hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang

dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

- 2) **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.
- 3) **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya, hal yang sama tentu di ikuti dengan dampak yang ditimbulkan.** Perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat dalam upaya menghadapi bencana

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, Visi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan cita-cita Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur, dengan mendukung misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur yaitu " **Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan** ", dengan sasaran Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 16) Keterkaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Disamping permasalahan-permasalahan seperti pada point b diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan serta mengembangkan saint (pengetahuan), teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Meningkatkan koordinasi badan penanggulangan bencana daerah dengan Instansi Pusat dan Daerah dengan memanfaatkan fasilitasi, bantuan teknis dan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Memperluas kerjasama dengan Pemerintah, TNI/ POLRI ,Akademisi,Swasta, LSM, Ormas, dan masyarakat (Pentaheliks) untuk penanggulangan bencana.

- 5) Membuat, memperbanyak dan mendistribusikan kepada masyarakat pedoman-pedoman singkat yang mudah dimengerti tentang cara penyelamatan dalam menghadapi atau saat bencana.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
- 7) Mendayagunakan kemampuan yang ada, melakukan mobilisasi, modifikasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi social ekonomi yang dapat berdampak timbulnya bencana.
- 8) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana melalui media.
- 9) Kualitas Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang handal dan memadai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan yang baik.
- 10) Mengembangkan inovasi untuk sosialisasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, baik pada saat tidak ada bencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
- 11) Mendayagunakan kapasitas yang ada dan sarana prasarana yang tersedia untuk promosi kegiatan penanggulangan bencana.
- 12) Menganalisis data dan informasi hazard dan risiko yang ada untuk mengkaji perubahan kondisi social ekonomi yang dapat berdampak negatif ataupun menimbulkan bencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
BPBD Provinsi Kalimantan Timur**

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----|---|--------|--|----------------|----------------|---|--------|--|----------------|----------------|
| | Program | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | BPBD | Percentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana | | 14.359.178.583 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | BPBD | Percentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana | 95% | 13.673.298.130 |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | BPBD | Percentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | | 4.270.920.000 | Program Penanggulangan Bencana | BPBD | Percentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | 82,67% | 3.156.119.870 |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim tahun 2022 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 , berdasarkan pada hasil forum perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan yaitu ditekankan pada standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan, pada tabel 2.4

Tabel 2.4 . Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volumen | Catatan |
|-----|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | | | | |
| | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | |
| 1. | Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 10 Kab/Kota | Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan | 12 Laporan | assesmen / pendataan wilayah terdampak bencana, data dan informasi kebencanaan |
| 2. | Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara | Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk | 12 desa/kelurahan | Pembentukan relawan, pengembangan kemandirian masyarakat terhadap bencana |
| 3. | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | BPBD | Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) | 30 Peserta | Peningkatan Kapasitas tim reaksi cepat kab/ Kota |
| | Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | |
| 1. | Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 10 Kab/Kota | Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana | 12 Laporan | Pengerahan tenaga penanganan bencana dan peralatan penanganan ke wilayah terdampak bencana |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10 Kab/Kota | Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia | 12 Laporan | Penyedian dan pemberian bantuan logistik kebutuhan terdampak bencana |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada *upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.*

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Dalam situasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

Dalam situasi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan pengurangan resiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Kaltim.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah dirumuskan yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dimana sebagai dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta

tujuan Gubernur Kalimantan Timur. Sesuai dengan Sasaran strategis RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu “Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana (Sasaran ke 16), maka Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023) adalah :

“Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana”, peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui kegiatan : 1) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan 3) pemulihan baik rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana;

sasaran Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Sasaran Strategis BPBD Prov. Kaltim

| Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2022 |
|---|---|--------------------|
| Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana | Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana | 151,49 |
| Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Mengurangi Risiko Bencana | Indikator Sasaran Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana | 85% |

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan

di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan serta anggaran yang tersedia. Usulan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 meliputi, yaitu :

3.3.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, kegiatan meliputi antara lain:

3.3.1.1 Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Subbag Umum, Subbag Penyusunan Program dan Subbag Keuangan ;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

3.3.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2019 - 2023, berdasarkan kepada bidang pelaksana adalah:

3.3.2.1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, meliputi sub kegiatan :

1. **Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3.3.2.2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

2. **Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3. **Penanganan Pascabencana Provinsi,** pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4. **Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

3.3.2.3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. **Respon cepat penanganan Darurat Bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

2. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

3.3.2.4 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaaan, pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel. IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

| Kode | URAIAN RENSTRA | OUTPUT RENSTRA | Rencana Tahun 2022 | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|-----------------|---|---|--------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | Lokasi | Target | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.05 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | 16.829.418.000 | | | 18.804.098.583 |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana | | 95 % | 13.673.298.130 | | 100 persen | 14.534.178.583 |
| 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | 100 Persen | 169.300.980 | | 75 nilai | 742.800.000 |
| 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | smd | 10 Dokumen | 25.362.450 | smd | 4 Dokumen | 271.000.000 |
| 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kritis Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | smd | 9 Laporan | 54.200.000 | smd | 5 Laporan | 318.800.000 |
| 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | smd, 9 kab/kota | 3 Laporan | 89.738.530 | smd, 9 kab/kota | 9 Perangkat | 153.000.000 |
| 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 Persen | 9.832.618.583 | | 100 persen | 9.866.818.583 |
| 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan | smd | 12 Dokumen | 9.554.098.583 | smd | 3 Dokumen | 9.554.098.583 |
| 1.05.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | smd | 12 dokumen | 278.520.000 | smd | 12 Bulan | 312.720.000 |
| 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 0 Persen | - | | 100 persen | 53.780.000 |
| 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaiannya yang Diadakan | | 0 stel | | smd | 75 buah | 53.780.000 |
| 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 Persen | 1.065.811.430 | | 100 % | 1.050.614.288 |
| 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor | smd | 41 unit | 558.500.000 | | 25 unit | 175.000.000 |
| 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | smd | 12 Laporan | 50.831.430 | smd | 12 Bulan | 130.664.288 |
| 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi | | 80 OT | 456.480.000 | | 50 OT | 744.950.000 |
| 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 Persen | 1.874.165.712 | | 100 persen | 1.874.165.712 |
| 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | smd | 12 Laporan | 340.800.000 | smd | 12 Bulan | 340.800.000 |
| 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS | smd | 12 Laporan | 1.533.365.712 | smd | 12 Bulan | 1.533.365.712 |
| 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | 100 Persen | 731.401.425 | | 4 unit | 946.000.000 |
| 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional | smd | 10 unit | 394.624.400 | smd | 12 Bulan | 346.000.000 |
| 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | smd | 50 unit | 161.180.000 | smd | 12 Bulan | 250.000.000 |
| 1.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | smd | 3398 m2 | 175.597.025 | smd | 12 Bulan | 350.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Percentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | | 82,67 % | 3.156.119,870 | | 100,00 % | 4.269.920,000 |
| 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Percentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan | Provinsi Kaltim | 10 Persen | 318.000.000 | Provinsi Kaltim | 10 kab/kota | 250.000.000 |
| 1.05.03.1.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana | | 1 dokumen | 318.000.000 | | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Percentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | 100 Persen | 1.940.168,950 | | 13 Desa/ Kelurahan | 2.797.765,000 |
| 1.05.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana | Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim, Balikpapan, PPU, Paser, Bontang, Berau, Mahakam Ulu | 1 dokumen | - | | 1 Dokumen | 300.000.000 |
| 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan | 10 Kab/Kota | 12 Laporan | 257.802,250 | 10 Kab/Kota | 1 Dokumen | 350.000.000 |
| 1.05.03.1.02.06 | Pengutaman Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk | PPU, Kubar, Kukar, Berau, Kutim, Paser | 12 Desa / Kelurahan | 756.124,700 | | 13 Desa/ Kelurahan | 611.500,000 |
| 1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana | 10 Kab/Kota | 5 Laporan | 600.000,000 | 10 Kab/Kota | 1 Dokumen | 1.210.000,000 |
| 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana | Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) | Kota Bontang | 30 orang | 326.242,000 | Kab. PPU | 30 Peserta | 326.265,000 |
| 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Percentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | | 100 Persen | 632.045,920 | | 85 % | 1.109.655,000 |
| 1.05.03.1.03.02 | Respon cepat penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana | Smd | 12 Laporan | 382.695,950 | Smd | 17 Kali | 569.655,000 |
| 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia | 9 kab/Kota | 12 Laporan | 249.349,970 | 9 kab/Kota | 100 Barang | 540.000,000 |
| 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Percentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | 100 Persen | 265.905,000 | | | 112.500,000 |
| 1.05.03.1.04.04 | Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan | Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan | Prov. Kaltim | 1 aplikasi | 265.905,000 | Prov. Kaltim | 3 Media | 112.500,000 |

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/ 6295 /B.PPEPD-Bapp/2022 tanggal 11 Juli 2022 Hal Pengisian Data Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penambahan anggaran perubahan pagu indikatif dari pagu semula Rp. 16.101.292.327,00 menjadi Rp. 16.980.292.327,00 secara lengkap penambahan pagu indikatif BPBD Prov. Kaltim tersebut sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2022 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023, sebagai Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan 2022 ini akan memberikan peran dalam meningkatkan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kebencanaan dan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat umum terutama masyarakat Kalimantan Timur. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Renja 2021 ini yaitu :

1. Transisi sippd menjadi sipd khususnya terkait nomenkultur Permendagri nomor 90 Tahun 2019 maka Perlunya dilakukan penyesuaian kembali terhadap kegiatan baik rincian belanja, tolak ukur dan target yang akan dicapai.
2. Pelaksanaan yang didasarkan / berbasis pada kinerja, diperlukannya penambahan sub kegiatan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan kegiatan kebencanaan.
3. Masih terdapatnya kegiatan atau sub kegiatan pendukung terhadap program prioritas yang belum dapat dilaksanakan, disebabkan masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan rencana kerja ke dalam aplikasi SIPD.
4. Kesulitan dalam perumusan / penghitungan tolak ukur indikator kegiatan terhadap target yang akan dicapai.

Masih perlunya penyesuaian/ perbaikan terhadap Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.



LAMPIRAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | | |
|------|----|----|--|--|---|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 16,829,418,000 | 16,101,292,327 | 16,980,292,327 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Percentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana | % % | 95 % | 95 % | 13,673,298,130 | 12,939,946,420 | 13,268,946,420 | | | | | | | | | 95 % | 14,534,178,583 | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 Persen | 742,800,000 | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen Persen | 100 Persen | 100 Persen | 169,300,980 | 387,762,500 | 516,762,500 | | | | | | | | | 100 Persen | 271,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | | | | | | | | | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPBD Provinsi Provinsi Kalimantan Timur | 10 dokumen | 318,800,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 9 laporan | 9 laporan | 54,200,000 | 64,197,500 | 193,197,500 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPBD Provinsi Provinsi Kalimantan Timur | 9 laporan | 153,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 07 | | | | | | | | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPBD Provinsi Provinsi Kalimantan Timur | 3 laporan | 271,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 9,832,618,583 | 9,143,132,652 | 9,143,132,652 | | | | | | | | | 100 Persen | 9,866,818,583 | | | | | |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|---|---|--|---|---|--|------------|----------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---|------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9,554,098,583 | 8,901,092,652 | 8,901,092,652 | Kota Samarinda Sungai Kunjang, Karang Anyar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik | Pagawai PNS dan Pejabat Pengelola Keuangan BPBD Prov. Kaltim | 12 Dokumen | 9,554,098,583 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 278,520,000 | 242,040,000 | 242,040,000 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Pagawai PNS dan Pejabat Pengelola Keuangan BPBD Prov. Kaltim | 12 dokumen | 312,720,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 0 | 0 | 0 | | | | | 100 Persen | 53,780,000 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian yang Diadakan | | | 0 stel | 0 stel | 0 | 0 | 0 | | | | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur | 0 stel | 53,780,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 1,065,811,430 | 1,102,930,000 | 1,302,930,000 | | | | | | 100 Persen | 1,050,614,288 | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor | | | 85 unit | 85 unit | 558,500,000 | 737,089,000 | 737,089,000 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Geding, Peralatan Perlengkap an Kantor , dan Koordinasi Konsultasi Instansi serta institusi terkait | 85 unit | 175,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 12 laporan | 12 laporan | 50,831,430 | 128,841,000 | 128,841,000 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Geding, Peralatan Perlengkap an Kantor , dan Koordinasi Konsultasi Instansi serta institusi terkait | 12 laporan | 130,664,288 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|--|--|--|--|--|---------|----------------|-------------|---------------------|---|------------------------------|---|---|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi | | 80 OT | 80 OT | 456,480,000 | 237,000,000 | 437,000,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Geding, Peralatan Perlengkap an Kantor , dan Koordinasi Konsultasi Instansi serta institusi terkait | 80 OT | 744,950,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**Provinsi Kalimantan Timur****Tahun 2022**

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|----|----|------|---|---|---|---|---|--|------------|----------------|---------------|------------------------|--|------------------------------|--|--|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 1,874,165,712 | 1,880,572,268 | 1,880,572,268 | | | | | | 100 Persen | 1,874,165,712 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 12 laporan | 12 laporan | 340,800,000 | 206,385,860 | 206,385,860 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Karyawan, dan Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Timur | 12 laporan | 340,800,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS | | | 12 laporan | 12 laporan | 1,533,365,712 | 1,674,186,408 | 1,674,186,408 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Karyawan, dan Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Timur | 12 laporan | 1,533,365,712 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 731,401,425 | 425,549,000 | 425,549,000 | | | | | | 100 Persen | 946,000,000 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional | | | 23 unit | 23 unit | 394,624,400 | 261,011,000 | 261,011,000 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Gedung Kantor, Sarana Prasarana dan Kendaraan dinas/Oper asional BPBD Prov. Kaltim | 23 unit | 346,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor | | | 50 unit | 50 unit | 161,180,000 | 52,438,000 | 52,438,000 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Gedung Kantor, Sarana Prasarana dan Kendaraan dinas/Oper asional BPBD Prov. Kaltim | 50 unit | 250,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Reabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | | | 3398 m2 | 3398 m2 | 175,597,025 | 112,100,000 | 112,100,000 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Gedung Kantor, Sarana Prasarana dan Kendaraan dinas/Oper asional BPBD Prov. Kaltim | 3398 m2 | 350,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|----|----|------|---|--|--|---|---|--|-------------|----------------|---------------|------------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | 0 % | | 0 % | 82,67 % | 82,67 % | 3,156,119,870 | 3,161,345,907 | 3,711,345,907 | | | | | 82,67 % | 7,206,305,000 | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana | Per센 | | Per센 | 100 Persen | 100 Persen | 318,000,000 | 956,580,800 | 1,206,580,800 | | | | | 100 Persen | 250,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | 10 kab/kota yang mendapatkan informasi KRB dan 1 dokumen RPB | | | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 318,000,000 | 956,580,800 | 1,206,580,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Instansi/Institusi, Badan, Lembaga, Masyarakat , Relawan, BPBD Kab/Kota, dan BNPB | 10 Kab/Kota | 250,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Per센 | | Per센 | 100 Persen | 100 Persen | 1,940,168,950 | 1,423,002,000 | 1,523,002,000 | | | | | 100 Persen | 5,734,150,000 | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Masyarakat , Relawan, Instansi/Institusi/Badan/Lembaga, BPBD Kab/Kota,d an BNPB | 1 Dokumen | 300,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|--|--------------------------------------|--|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------------|--|--|------------|--|---|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan | 12 laporan | 12 laporan | 257,802,250 | 194,321,000 | 294,321,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Masyarakat , Relawan, Instansi/Ins titusi/Bada n/Lembaga, BPBD Kab/Kota,d an BNPB | 12 laporan | 350,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**Provinsi Kalimantan Timur****Tahun 2022**

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|----|---|--|-------------------------------------|--|---|--|---------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------------|---|--|--|-------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk | | | 10 Kabupaten/Kota | 10 Kabupaten/Kota | 756,124,700 | 448,909,000 | 448,909,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Masyarakat , Relawan, Instansi/Institusi/Badan/Lembaga, BPBD Kab/Kota,dan BNPB | 10 Kabupaten/Kota | 611,500,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|--|--------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------------|--|--|-----------|--|---|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana | 4 Laporan | 4 Laporan | 600,000,000 | 513,360,000 | 513,360,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Masyarakat , Relawan, Instansi/Ins titusi/Bada n/Lembaga, BPBD Kab/Kota,d an BNPB | 4 Laporan | 1,210,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|--|--------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------|---|--|----------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) | 30 Orang | 30 Orang | 326,242,000 | 266,412,000 | 266,412,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Masyarakat, Relawan, Instansi/Institusi/Badan/Lembaga, BPBD Kab/Kota,d an BNPB | 30 Orang | 3,262,650,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**Provinsi Kalimantan Timur****Tahun 2022**

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|----|---|--|---|---|---|--|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|----------------|--|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 632,045,920 | 625,731,207 | 825,731,207 | | | 100 Persen | 1,109,655,000 | |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|--|---|--|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------------|--|--|------------|--|---|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana | | 12 laporan | 12 laporan | 382,695,950 | 316,212,000 | 416,212,000 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Kawasan/Masyarakat Rentan dan Terdampak Bencana | 12 laporan | 569,655,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|--|--|--|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia | | 12 laporan | 12 laporan | 249,349,970 | 309,519,207 | 409,519,207 | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Kawasan/Masyarakat Rentan dan Terdampak Bencana | 12 laporan | 540,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**Provinsi Kalimantan Timur****Tahun 2022**

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akkhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--------------|----|----|------|---|---|--|---|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|--|--|------------|--|---|
| | | | | | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 265,905,000 | 156,031,900 | 156,031,900 | Kota Samarinda Semua Kecamatan Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | BPBD Kab/Kota, Instansi/Ins titusi Terkait , BNPB | 100 Persen | 112,500,000 | |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan | | | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 265,905,000 | 156,031,900 | 156,031,900 | | | | | 1 aplikasi | 112,500,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 16,829,418,000 | 16,101,292,327 | 16,980,292,327 | | | | | | 21,740,483,583 | |